



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **YADI RUYADI**
2. Jabatan : **KETUA SA**
3. NHK : **280887**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 996.000.000**

1. Tanah Seluas 218 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. Tanah Seluas 707 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/95 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 110 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/35 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 183.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Y1G02N15LO A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 50.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	180.223.769
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.409.223.769
III. HUTANG	Rp.	64.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.345.023.769

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.